



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

PENGUMUMAN

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) DAN PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA

RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPKH

Nomor: B. 27003/BPKH/BP/A7.4/10/2021

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BPKH

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BPKH yang telah mempertimbangkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, ketentuan dan pedoman penyusunan laporan keuangan BPKH dan perkembangan transaksi BPKH meliputi:

- 1) Memberikan masukan proses pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan BPKH
- 2) Memberikan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Bilingual (Indonesia dan Inggris) BPKH

Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : 2 (dua) orang Tenaga Ahli/Personil sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Tenaga Ahli sebagai Ketua Tim, dengan kualifikasi:
 - a) berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang penyusunan laporan keuangan/audit laporan keuangan;
 - b) berpengalaman minimal 2 (dua) kali melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian/audit laporan keuangan konsolidasian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c) pendidikan minimal strata dua (S2).
2. 1 (satu) orang anggota tim dengan kualifikasi:
 - a) berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang penyusunan laporan keuangan /audit laporan keuangan;
 - b) berpengalaman minimal 1 (satu) kali melakukan penyusunan laporan keuangan/audit laporan keuangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c) pendidikan minimal strata satu (S1).

- Syarat Izin Usaha : Memiliki izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan masih berlaku sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik atau memiliki izin usaha sebagai Konsultan Aktivitas Akuntansi/Manajemen Lainnya dengan KBLI 69201/70209
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender
- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Paket dengan 1 (satu) Keluaran (*Output*) berupa 1 (satu) set dokumen Laporan Pendampingan Penyusunan LK yang dilampiri dengan Laporan Keuangan BPKH per 30 November 2021 yang telah mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:
- Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
 - Ketentuan dan Pedoman penyusunan laporan keuangan BPKH seperti UU, PP, PBPBH dan PKBP
 - Perkembangan transaksi yang ada, khususnya transaksi investasi yang dilakukan BPKH
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) termasuk semua pajak, bea, retribusi, pungutan lain yang sah, dan out of pocekt expenses

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, ***diwajibkan*** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan ***mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com*** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui ***email divisi.pengadaan@bpkh.go.id*** paling lambat pada hari ***Jumat, 29 Oktober 2021 Pukul 23.59 WIB*** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BPKH.*

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk memasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan. Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan selain melalui Aplikasi Pengadaan tidak dapat diterima.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

| No | TAHAPAN | JADWAL | | |
|----|---|--|-------------------|-------------------|
| | | Hari/Tanggal | Waktu | |
| | | | Mulai | Akhir* |
| 1. | Pendaftaran Pelaku Usaha | Rabu– Jumat, 27 – 29 Oktober 2021 | Rabu, 09.00 WIB | Jumat, 23.59 WIB |
| 2. | Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com | | | |
| 3. | Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan | | | |
| 4. | Pengumuman RFQ/RFI (Vendor Survey) | Rabu– Senin, 27 Oktober – 1 Nov 2021 | Rabu, 09.00 WIB | Senin, 12.00 WIB |
| 5. | Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha | | | |
| 6. | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih | Selasa – Kamis, 2 – 4 November 2021 | Selasa, 08.00 WIB | Kamis, 23.59 WIB |
| 7. | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | Jumat – Selasa, 5 – 9 November 2021 | Jumat, 08.00 WIB | Selasa, 23.59 WIB |
| 8. | Penandatanganan SPK | Rabu, 10 November 2021 | 08.00 WIB | 17.00 WIB |

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Oktober 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 27003/BPKH/BP/A7.4/10/2021

Tanggal : 27 Oktober 2021

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

| No. | Slot | Dokumen | Perorangan | Non Perorangan | | | | | Foreign Company |
|---|---------------------------------|--|------------|--------------------|----------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | PT / CV / Koperasi | KAP/KIPP | Law Firm | Notaris | Lembaga Pendidikan | |
| DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB | | | | | | | | | |
| 1 | Akte Pendirian | - Akte Pendirian | | V | V | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan | | | | | V | | |
| | | - Surat Keputusan Dewan Fakultas | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register | | | | | | | V |
| | Akte Perubahan | Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi) | | V | V | | | | |
| | SK Kemenkumham (Akte Pendirian) | Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian) | | V | V | V | | | |
| | SK Kemenkumham (Akte Perubahan) | Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan) | | V | V | | | | |
| 2 | Domisli | - Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS) | | V | V | V | | | |
| | | - Profile Notaris | | | | | V | | |
| | | - Keputusan Dewan Fakultas | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register | | | | | | V | |
| 3 | NPWP Perusahaan | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan | | V | V | V | V | V | |
| 4 | SPT | Setoran Pajak Tahunan | | V | V | V | V | V | |
| 5 | SIUP | - Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) | | V | | | | | |
| | | - Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP | | | | V | | | |
| | | - Kartu ID PERADI | | | | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan | | | | | V | | |
| | | - Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number | | | | | | V | |
| 6 | TDP | - Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha | | V | V | | | | |
| | | - Kartu ID PERADI | | | | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN | | | | | V | | |
| | | - Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number | | | | | | V | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

| No. | Slot | Dokumen | Perorangan | Non Perorangan | | | | | Foreign Company |
|--|--|---|------------|--------------------|---------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | PT / CV / Koperasi | KAP/KPP | Law Firm | Notaris | Lembaga Pendidikan | |
| 7 | Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba | - Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi) | | V | V | V | V | V | V |
| | | - Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi) | | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN PERSONAL - WAJIB | | | | | | | | | |
| 8 | KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi | - Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris | | V | V | V | | | V |
| | | - Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi | V | V | V | V | V | V | V |
| 9 | NPWP Komisaris & Direksi | Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi | V | V | V | V | V | V | |
| 10 | Ijazah Terakhir Tenaga Ahli | Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama | V | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB | | | | | | | | | |
| 11 | Surat Pernyataan Vendor | Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com) | V | V | V | V | V | V | V |
| 12 | Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir) | Surat Perjanjian Kerjasama / PO | V | V | V | | | V | V |
| 13 | Struktur Organisasi | Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart | | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB | | | | | | | | | |
| 14 | Izin Lain-lain | Perizinan seperti IUIK | | V | V | V | | | |
| 15 | Surat Keagenan | Perizinan Keagenan atau NIB | | V | | | | | |
| 16 | Angka Pengenal Impor | Angka Pengenal Impor atau NIB | | V | | | | | |
| 17 | Sertifikasi Perusahaan | - Sertifikasi Perusahaan | | V | | V | V | | V |
| | | - Surat Tanda Terdaftar KAP OJK | | V | V | | | | |
| 18 | Sertifikasi Tenaga Ahli | Sertifikasi Tenaga Ahli | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | NIB | Nomor Induk Berusaha | | V | V | | | | |
| 20 | PKP | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | | V | V | V | | V | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.